



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NORAWATNY
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 260705

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.352.629.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 392.029.000
2. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 705.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 125.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, WULLING CONVERO S Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 151.000.000****D. SURAT BERTHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 684.919.953****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 2.313.548.953**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.313.548.953

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.